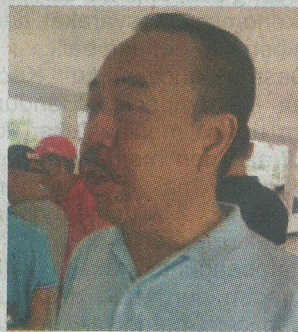


Serapan Anggaran di PRKP Sudah Mencapai 38,9 Persen Dari Anggaran Tahun 2017 Sebesar Rp 174 Miliar



Tatang Tiswa Sekretaris PRKP Kabupaten Karawang.

Karawang, **Demokratis** Akhir-akhir ini menjelang triwulan ke tiga, ramai dibicara-



Drs Teddy Rusfendi Sutisna Sekda Pemkab Karawang.

kan soal serapan anggaran untuk tahun 2017 di Pemkab Karawang masih jeblok, dari total

anggaran Rp 4,3 triliun. Bahkan dikatakan serapan anggaran dari Kantor PUPR masih mencapai 16 persen, di Kantor PRKP baru 6 %. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) setempat mencatat hingga pertanggal 20 Juli 2017 lalu serapan anggaran baru 34,28 persen. Jebloknya serapan anggaran tersebut karena ada di SKPD teknis seperti di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) serta di Dinas

Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (PRKP) masih jauh di bawah harapan. Di PUPR total ploting Rp 913,9 miliar, sedangkan yang baru terserap Rp 148 miliar. Namun di beberapa SKPD telah melebihi anggaran.

Diakui oleh Sekda Pemkab Karawang, Drs H Teddy Rusfendi Sutisna kepada Demokratis ketika serapan anggaran 2017 itu dikonfirmasi kepadanya, Jumat(28/7),

» **Bersambung ke Hal. 15**

Serapan Anggaran di Sambungan Hal. 1

seusai melaksanakan olahraga Jumat di Karang Pawitan, mengatakan dan mengakui bahwa serapan anggaran masih jeblok. "Memang benar bahwa penyerapan anggaran tersebut masih jeblok, tapi saya berkeyakinan dan optimis bahwa penyerapan anggaran tahun 2017 sebesar Rp 4,3 triliun tersebut dapat terakomodir. Karena Surat Perintah Membayar (SPM) masih berjalan. Sekarang serapan anggaran sudah mencapai 35 persen, sudah

ada kenaikan," katanya.

Sementara itu, Sekretaris PRKP, H Tatang Tiswa, ketika ditemui oleh Demokratis, Jumat (28/7) di kantornya, guna mengkonfirmasi dimana pemberitaan di mass media bahwa serapan anggaran di Dinas PRKP masih jeblok dan baru 6 persen dari jumlah total Rp 174 miliar. Namun H Tatang Sutisna membantah, bahkan dia bertanya yang 6 persen itu pertanggal berapa. Karena sesuai dengan catatan pertanggal

27 Juli 2017, serapan anggaran di Dinas PRKP telah mencapai 38,9 persen.

H Tatang Tiswa mengungkapkan bahwa SP2D sudah cair, seperti belanja langsung Rp 62.141.581.963 miliar, belanja tidak langsung Rp 58,5 miliar. "Kalau dihitung dari Surat Perintah Membayar (SPM) sebesar Rp 86,8 miliar, sudah mencapai 43,9 persen. SPM kini masih proses berjalan. Dan kemudian perlu diketahui pula, untuk anggaran pembuatan Rumag Tidak Layak (Ruti-

lahu) berjumlah 1.236 unit yang tersebar di 309 desa/kelurahan, anggarannya sudah mencapai Rp 50 miliar lebih. Untuk jalan lingkungan Rp 28 miliar di 12 kelurahan. Saya yakin karena masih ada waktu hingga tahun akhir anggaran bulan Desember mendatang, saya kira masih bisa terealisasi," katanya seraya mengatakan bisa mencapai 90 persen. Jumlah anggaran tahun 2017 sebesar Rp 174 miliar sudah termasuk gaji karyawan.

(Juanda Sipahutar)

SMP N 1 Purwasari Dapat Bantuan 3 Ruang Kelas Baru

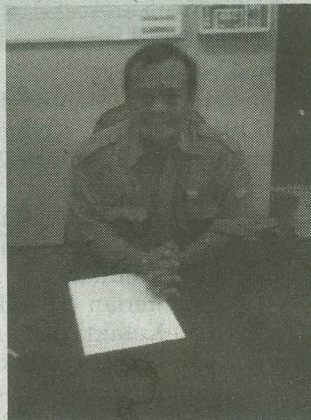
Karawang, **Demokratis**

Sarana dan perasarana pendidikan sangatlah berperan penting untuk menunjang kelancaran proses kegiatan belajar mengajar (KBM), namun kalau tidak didukung alat atau sarana dan perasarana pendidikan maka hasilnya yang dicapai tidak akan maksimal seperti apa yang diharapkan.

Sarana perasarana yang ada di SMP N 1 Purwasari Kecamatan Purwasari, Kabupaten Karawang akan sangat memadai dari struktur gedung yang sedang

dibangun 3 ruang kelas baru (RKB). Drs Juhanda Kepala Sekolah SMP N 1 Purwasari berharap pembangunan yang sedang dilaksanakan agar dapat berjalan lancar. Selain itu, pihaknya meminta kepada pemerintah pusat perovinsi maupun daerah untuk selalu mendukung dan memenuhi sarana dan perasarana sekolah yang dibutuhkan agar mutu pendidikan dan proses kegiatan belajar mengajar (KBM) lebih baik lagi.

"Karena tanpa adanya sarana perasarana tidak akan melakukan inter-



aksi yang kondusif dan semoga dengan adanya pembangunan ini proses mengajar kami lebih baik lagi sehingga kami dapat



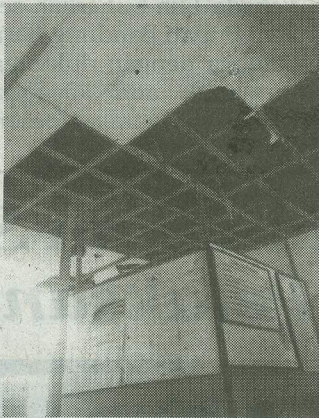
mencetak siswa-siswi yang berprestasi dan dapat membanggakan sekolah yang kami pimpin," pungkasnya. (Wahyudin)

SDN Pangulah Baru 1 Butuhkan Perhatian Pemerintah

Karawang, Demokratis

SDN Pangulah Baru 1 yang berlokasi di Desa Pangulah Baru Kecamatan Kota Baru Kabupaten Karawang berharap mendapatkan bantuan dari pemerintah untuk pembangunan rehab berat 3 lokal satu perpustakaan karena dalam kegiatan belajar mengajar harus didukung dengan sarana prasarana yang cukup agar dalam hal pembelajaran dapat berjalan dengan efektif dan kondusif.

Nanang Adhuri SPd SD sebagai kepala sekolah saat ditemui Demokratis beberapa pekan lalu mengatakan bahwa sekolah yang ia pimpin saat ini yaitu SDN Pangulah Baru 1 dibantu dengan 11 tenaga pengajar dengan PNS 7 dan honorer 4 dan memiliki 230 siswa-siswi dengan fasilitas ruang kelas yang sangat tidak memadai 3 ruang kelas yang saat ini sudah sangat rusak parah tentunya menjadi kendala dalam



kegiatan belajar mengajar (KBM) sehingga sangat mengharapkan perhatian

dan bantuan dari pemerintah pusat, provinsi maupun daerah untuk rehab berat 3 lokal dan perpustakaan.

"Kami berharap kepada pemerintah untuk selalu memperhatikan sekolah yang perlu bantuan sarana maupun prasarana karena sekolah suatu tempat yang sangat penting untuk menimba ilmu dan untuk terciptanya suatu kegiatan belajar mengajar yang kondusif tentunya harus didukung dengan sarana prasarana yang cukup," pungkasnya.

(Jenal Alviansyah)

Serapan Anggaran Baru Mencapai 34,28 % dari Anggaran APBD Sebesar Rp 4,3 Triliun Tahun 2017

Karawang, **Demokratis**

Meskipun serapan anggaran baru mencapai 34,28 % dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2017 dari total Rp 4,3 triliun, namun Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemkab Karawang, Hadis Herdiana masih yakin dan optimis serapan anggaran kedepan dapat terealisasi.

Demikian pernyataan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemkab Karawang, Hadis Herdiana kepada Demokratis (24/7) di ruang kerjanya ketika dikonfirmasi terkait serapan anggaran pada triwulan kedua. Seyoganya serapan anggaran triwulan kedua ini minimal telah mencapai 50 % dari total APBD tahun 2017 sebesar Rp 4,3 triliun.

Hadis Herdiana mengungkapkan dan mengakui serapan anggaran masih jauh dari harapan. "Kalau idealnya itu pada triwulan kedua harusnya sudah 50 %, tapi situasi dan kondisi belum stabil karena masih banyak yang



Hadis Herdiana Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Karawang.

dalam proses lelang," katanya.

Menurut KBPKAD, Hadis Herdiana, anggaran yang sudah terserap sejauh ini terdiri dari belanja tidak langsung (BTL) sebesar Rp 47,23 % dan belanja langsung (BL) di antaranya untuk gaji pegawai sebesar

Rp 22,73 persen.

"Serapan anggaran yang kita hitung berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), sementara Surat Perintah Membayar (SPM) yang masih dalam proses tidak kita hitung. Sejauh ini ada beberapa Satuan Kerja Per-

angkat Dinas (SKPD) yang telah mampu menyerap anggaran melebihi angka serapan anggaran Pemkab Karawang secara keseluruhan di antaranya, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) sebesar Rp 42,89 persen serta Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, 40,67 %, dan disusul Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Karawang, sebesar Rp 39,60 % dan Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Karawang 37,69 persen.

Sementara itu, kata Hadis Herdiana, SKPD teknis seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PURR) serta Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (PRKP) masih jauh di bawah harapan.

"Untuk PURR baru 16 persen dari total ploting anggaran Rp 913,9 miliar atau baru sekitar Rp 148 miliar. Sedangkan PRKP baru 6 persen. Alasan mereka baru selesai lelang dan sebagian masih dalam proses pengerjaan," tanda Hadis Herdiana kepada Demokratis.

(Juanda Sipahutar)

Kantor Inspektorat Tak Berwenang Mengawasi Dana Desa/Bantuan Gubernur



Mukhlis Villy Inspektorat Pembantu 2.

Karawang, **Demokratis**

Banyak pihak beranggapan bahwa pengawasan terhadap Dana Desa yang dikurcurkan oleh pemerintah maupun Bantuan Gubernur adalah yang berwenang dalam pengawasan Dana Desa adalah, pihak Kantor Inspektorat Kabupaten/Kota. Ternyata dalam pengawasan penggunaan Dana Desa (DD) maupun Bantuan Gubernur (Bangub) adalah wewenang Kantor Inspektorat Provinsi. Hal tersebut sesuai dengan Sistem Pengawasan Intern Pemerintah Pasal 49 yang menyatakan bahwa Kantor Inspektorat Kab/Kota hanya melaksanakan pengawasan terhadap APBD 2.

Demikian disampaikan

oleh Mukhlis Villy, selaku petugas Inspektorat Pembantu 2, Kantor Inspektorat Kabupaten Karawang, ketika bincang-bincang di ruang kerjanya, Rabu (26/7), dengan Demokratis.

"Supaya jangan sampai rancu dan jangan berasumsi bahwa jika ada kasus terhadap penggunaan Dana Desa (DD) atau Bantuan Gubernur (Bangub), wewenang yang menanganinya adalah pihak Provinsi," kata Mukhlis Villy yang gemar ketawa dan juga akrab terhadap wartawan tersebut.

Mukhlis Villy yang menjabat sebagai Inspektur Pembantu 2 di Kantor Inspektorat Karawang ini dengan blak-blakan berbicara hal tugas-tugas pokoknya. Dia

menjelaskan dari A hingga Z, agar para wartawan jangan sampai salah membuat berita. Maka petugas Inspektorat 2 ini memberikan paparan dengan jujur dan terbuka.

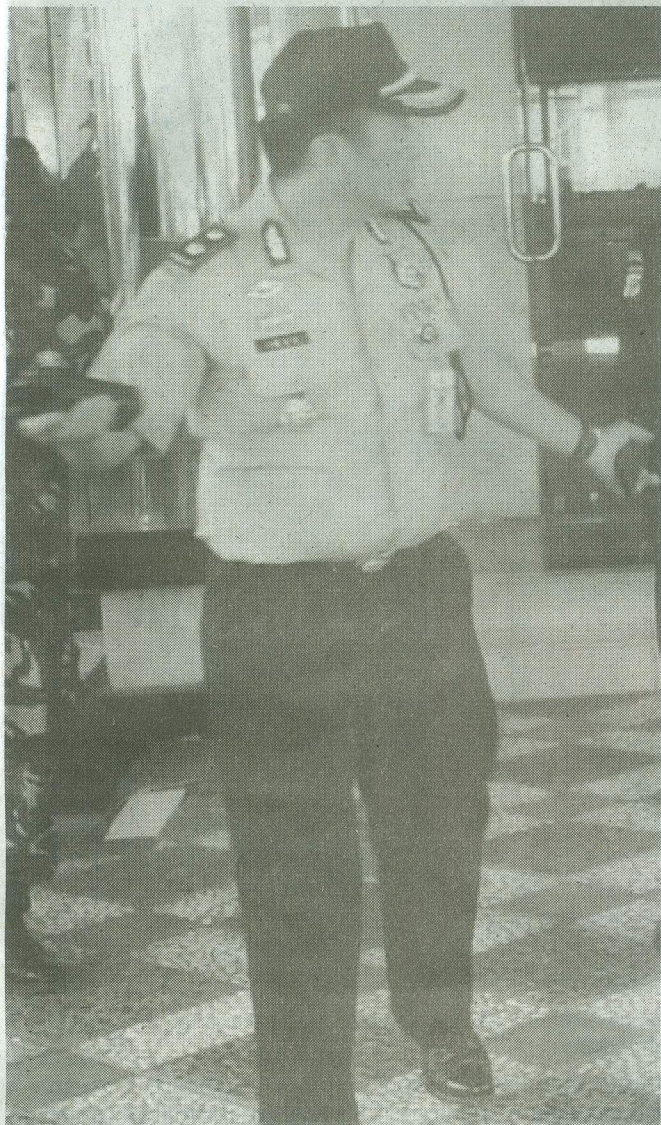
Dan perlu juga dipahami oleh rekan-rekan wartawan bahwa tugas pokok Kantor Inspektorat Karawang tidak hanya melakukan pemeriksaan terhadap keuangan (audit), akan tetapi ada aspek pembinaan atau kegiatan reguler." Jadi tugas-tugas kami bukan hanya melakukan audit keuangan saja, tapi ada aspek pembinaan," katanya.

Kemudian lebih jauh Mukhlis Villy, inspektorat Pembantu 2 mengungkapkan dengan perlu diketahui bahwa Program Kegiatan Pengawasan Tahunan (PKPT) Kantor Inspektorat Kabupaten Karawang ada 4 aspek yakni, 1. Aspek Keuangan, 2. Aspek Sarana dan Prasarana, 3. Aspek Tindakan dan ke empat adalah Aspek Sumber Daya Manusia (SDM).

"Tentu ke 4 aspek ini, berarti Kantor Inspektorat tidak hanya melakukan audit keuangan, namun melakukan aspek pembinaan juga," ucapnya seraya menambahkan jika ada teman pers memberitakan ada Kepala Desa diperiksa oleh Kantor Inspektorat hal penyalahgunaan Dana Desa (DD) atau Dana Bantuan Gubernur, itu tidak benar.

Berati belum tahu betul dalam pengawasan soal Dana Desa maupun Bantuan Gubernur (Bangub). Oleh karena itu, berhati-hatilah Kepala Desa menggunakan uang negara karena bisa masuk bui. **(Juanda Sipahutar)**

Satreskrim Polres Kota Karawang Ciduk Penjahat Kambuhan



Kompol Iwan Ridwan Saleh Kapolsek Karawang Kota.

Karawang, Demokratis
Komplotan penjahat spesialis menyatroni rumah kosong di daerah Karawang, Jawa Barat, berhasil dicituk oleh petugas Satuan Reskrim Polsek Kota Karawang dari tempat persembunyiannya.

Para penjahat kambuhan yang kerap melakukan aksinya di daerah lumbung padi Karawang ini berinisial SY (19), SN (19) dan DN (20). Penjahat-penja-

hat yang diduga pelaku-pelaku tindak kriminalitas ini adalah penduduk Poponcol, Kelurahan Karawang Kulon, Kecamatan Karawang Barat.

Ketiga tersangka penjahat yang tergolong usia muda ini kini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Maka kini ketiga pria yang bertampang seram tersebut dimasukkan ke dalam sel untuk menunggu proses selanjutnya.

Kapolsek Karawang Kota, Kompol Iwan Ridwan Saleh SH MH melalui Kanit Reskrim Polsek Kota Karawang, Iptu Yoga Prayoga membenarkan adanya pencidukan tersangka pelaku kejahatan di wilayah hukumnya. Dia mengatakan, penangkapan para tersangka pelaku kejahatan tersebut bukanlah pencurian bermotor, namun pada (1/7) yang lalu terjadi perampokan di sebuah rumah kosong. Ketika dilakukan olah TKP, pihak kepolisian mengarah terhadap ketiga tersangka pemuda itu.

Dikatakan oleh Kanit Reskrim, Yoga Prayoga, setelah dilakukan penyidikan kemudian berhasil menangkap DN, Selasa (18/7) lalu. "Saat pemeriksaan dilakukan terhadap DN, dia mengaku telah membobol rumah kosong bersama dua temannya. Pengembangan kasus perampokan di rumah kosong ini dilakukan oleh pihak petugas Satuan Reskrim Kota Karawang, dengan cepat pihak petugas berhasil menciduk SY dan SN. Kini proses hukumnya masih tahap penanganan, ketiga tersangka kini diamankan di Polsek Kota Karawang," kata Iwan Ridwan Saleh melalui Kanit Reskrim Polsek Kar-

awang Kota, Yoga Prayoga.

Sebagai barang bukti yang berhasil disita oleh petugas Satreskrim dari tangan para tersangka adalah laptop dengan handphone. Sementara surat-surat berharga hasil kejahatannya dibuang ke kali Citarum. Namun surat-surat berharga tersebut masih ditemukan di pinggir sungai Citarum.

Disamping itu juga, kata Yoga Prayoga, dari tangan para tersangka berhasil pula menyita 3 sepeda motor tanpa dilengkapi dengan surat-surat. Ketiga motor itu adalah, Beat, Mio dan Vario. "Motor tersebut diduga hasil kejahatan. Setelah kami lakukan interogasi terhadap ketiga tersangka, ketiga sepeda motor tersebut merupakan hasil kejahatan. Dan sepeda motor itu dijual kepada seorang penadiah berinisial KM. Penadiahnya kini tengah kita kejar," ujar Yoga.

Dari keterangan para tersangka kepada Satreskrim yang menangani kasus tindak pidana kriminalitas ini, lokasi yang kerap mereka lakukan adalah di wilayah Karawang Kota sebanyak 4 kali, Kepuh, Anjun dan Gempol. Di daerah Telukjambe Timur dan di daerah Wadas. Menurut pengakuan para tersangka kepada polisi, 2 kali melakukan kejahatan pencurian bermotor (Curanmor). "Ketiga tersangka penjahat ini dijerat dengan Pasal 363 KUHP dengan ancaman penjara 5 tahun," tegas Yoga Prayoga. **(Juanda Sipahutar)**

Bupati Tinjau Langsung Kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS)

Karawang, Demokratis

Bupati Karawang dr Cellica Nurrachadiana didampingi Kadisdikpora Kabupaten Karawang lakukan monitoring pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah (MPLS) di Kabupaten Karawang dengan mengunjungi SMAN 5 Karawang, Rabu (19/7).

Monitoring ini, dijelaskan Bupati, berkenaan dengan penerimaan siswa-siswi baru dan instruksi dari Mendikbud. Dalam instruksi Mendikbud tersebut, beliau menambahkan bahwa masa pengenalan lingkungan sekolah (MPLS) atau dikenal dengan masa orientasi siswa (MOS) diubah dengan pola yang lebih baik. "Memang masih ada, cuma polanya telah dirubah dan tidak

lagi bersifat merendahkan harkat martabat manusia, dalam hal ini para siswa-siswi yang baru masuk sekolah," jelasnya.

Istilah MOS, terang Bupati lagi, kini sudah diganti menjadi masa pengenalan lingkungan sekolah (MPLS). Untuk itu ia meminta kepada pihak sekolah, agar mengawasi proses MPLS tersebut, sehingga kegiatan yang mengarah pada perlakuan tidak wa-

ruh mencari hal-hal yang tak masuk akal dan tidak ada konteksnya dengan pendidikan. Sekarang, ditegaskan dia bahwa pola tersebut diubah pada penekanan, di mana siswa-siswi akan dituntun untuk terlibat aktif dalam proses pendidikan. Mereka akan memperhatikan di sisi-sisi moralitas siswa, kemampuan individual, dan semangat kebersamaan di dalam pendidikan.

Langkah tersebut, terang Bupati, bukan berarti tidak menghargai senioritas, tapi kekeluargaan yang perlu digalakkan dalam pendidikan, dengan memperhatikan aspek manusiawi. "Sekarang ini bukan zamannya lagi ber-

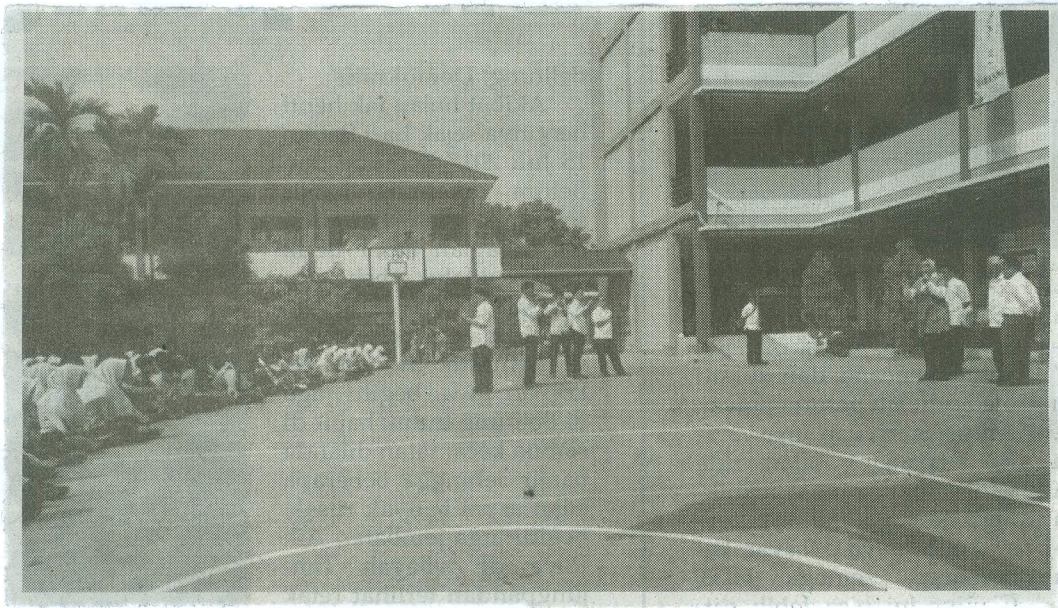
bicara masalah senioritas-junioritas, tapi tunjukan kemampuan," ucapnya.

Sekarang, diungkapkan Bupati bagaimana Kemendikbud telah membuat trobosan barunya dengan 'Gerakan Moral'. Kusnadi pun mengajak semua pihak agar mendukung pendidikan, karena dunia pendidikan ini adalah milik bersama seluruh komponen bangsa. Sehingga, dengan banyak gerakan moral, diharapkan dia, akan tumbuh generasi penerus bangsa yang berkualitas. "Gerakan moral ini baru dimulai tahun ini. Saya pikir banyak kekurangan dan belum maksimal, yang perlu dibenahi ke depan," ucapnya. (@opa)

jar tidak terjadi. "Banyak kegiatan positif yang bisa dilakukan di lingkungan sekolah yang manusiawi," tuturnya.

Selama ini, kata Bupati,

yang dilakukan kerap dilakukan dalam kegiatan MPLS, para siswa disu-

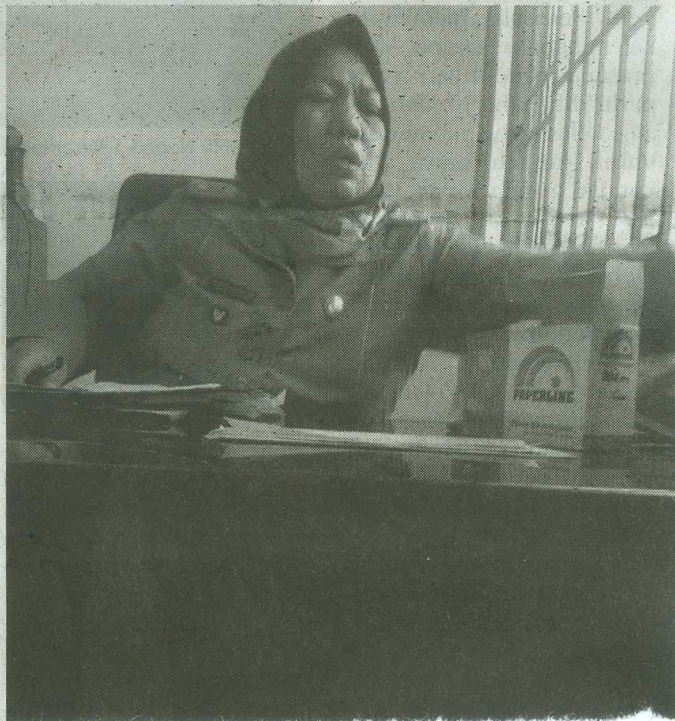


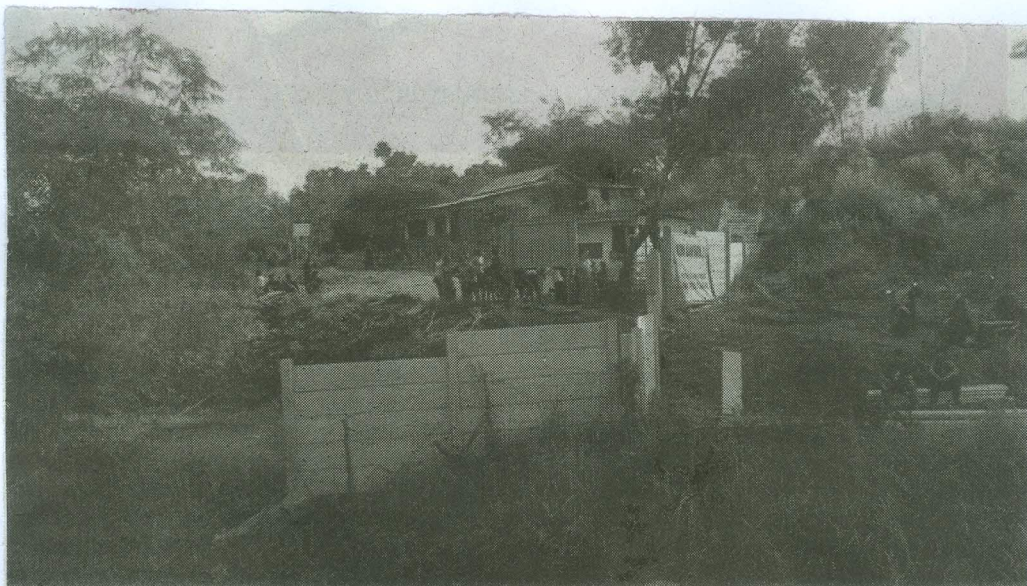
Kepala Desa Pucung Arogan dan Tidak Transparan

Karawang, **Demokratis**

Kepala Desa Pucung Hj Euis Kuraesin sangat arogan dan setiap didatangi atau hanya sekedar silaturahmi oleh rekan-rekan media ataupun LSM beliau selalu menghindar dan setiap ditanya anggaran beliau tidak pernah transparan. Padahal tupoksi seorang jurnalis itu mencari informasi sesuai Undang-undang Pers dan Keterbukaan Informasi Publik.

Salah satu wartawan dari sebuah media datang ke kantor Desa Pucung yang hanya sekedar silaturahmi dan mencari informasi, namun beliau bersikap tidak wajar, bahkan ada spekulasi yang tidak pantas diucapkan oleh seorang publik figur kepala desa. (Tim)





Pagar PT Pertiwi Lestari Dibongkar

Karawang, **Demokratis**

Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR) beserta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) mengancam akan membongkar paksa pagar PT Pertiwi Lestari jika mereka tetap bersikeras untuk menutup akses jalan bagi 52 Kepala Keluarga warga Dusun Cijambe Desa Margakaya Kecamatan Telukjambe Barat.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Acep Jamhuri mengatakan, pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan perwakilan PT Pertiwi Lestari agar membongkar sendiri pagar yang menghalangi akses warga dusun Cijambe.

"Dan setelah melakukan komunikasi, ternyata akses jalan itu sudah dibuka sendiri oleh pihak perusahaan," ujar Acep usai mengecek lokasi pagar bersama Satpol PP dan DPMPTSP Karawang di Desa Margakaya Kecamatan Telukjambe Barat, Jumat (14/7).

Menurut Acep, akses jalan dibuka untuk kepentingan warga, khususnya bagi anak-anak yang akan sekolah.

"Kami menerima perintah dari Bupati, agar akses jalan bisa dibuka bagi warga," katanya.

Dijelaskan, untuk permintaan jalan diperbaiki dan air bersih, nanti pihaknya akan melakukan koordinasi lagi dengan tim agar hal itu bisa disediakan.

"Untuk jalan akan segera dibangun agar bisa mempermudah akses bagi

warga, yang terpenting sekarang akses jalan sudah terbuka bagi warga," katanya.

Senada, Kasatpol PP Karawang, Asip Suhendar menyatakan jika saat ini yang terpenting adalah menyelamatkan anak-anak yang sebentar lagi akan masuk sekolah.

"Semua ada tahapannya dan sudah dilakukan oleh masing-masing leading sektor sesuai aturan yang berlaku," ujarnya.

Ia menambahkan, saat ini warga juga sudah menerima dengan pembukaan jalan untuk akses warga. Kedatangan ke lokasi ini untuk mengetahui sudah dibuka atau tidaknya akses warga ini.

"Karena jalan sudah dibuka, maka kami tidak perlu menurunkan anggota untuk membongkar pagar itu," singkatnya. (Nna)